

PROTEKSIONISME AMERIKA SERIKAT PASCA KRISIS FINANSIAL 2008

Maya Meralda Kartika
070710413

Abstrak :

Pasca Krisis Finansial 2008, pemerintah Amerika Serikat berupaya melakukan upaya penyelamatan sektor ekonomi domestik pada masa resesi ekonomi. Dalam sektor finansial, pemerintah Amerika Serikat meratifikasi berbagai kebijakan yang memungkinkan adanya bantuan finansial terhadap bank maupun lembaga keuangan yang terkena dampak krisis. Dari sektor industri dan perdagangan, presiden Amerika Serikat Barrack Obama menyerukan slogan “*buy American*” pada bulan Februari 2009 mendorong masyarakat Amerika Serikat untuk membeli produk domestik serta penggunaan bahan baku lokal dalam setiap pembelanjaan proyek pemerintah. Selain itu pemerintah Amerika Serikat juga memberlakukan restriksi terhadap berbagai produk impor dari berbagai negara, baik dengan hambatan tarif maupun non tarif serta bersifat teknis maupun non teknis.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat tersebut dinilai bersifat proteksionis dan tidak konsisten dengan prinsip WTO yang mengedepankan tiga hal yaitu anti diskriminasi produk, mengurangi atau menghilangkan batasan dan hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan internasional, dan pertimbangan terhadap kebutuhan negara berkembang untuk ekspansi pasar ke tingkat internasional.

Keywords: Krisis Finansial 2008, *buy American*, proteksionisme

Apa yang Disebut dengan Proteksionisme?

Dalam Kamus Ekonomi, proteksionisme diartikan dalam dua hal. Yang pertama merupakan paham perlindungan terhadap dunia usaha yang dilakukan pemerintah¹. Yang kedua adalah kebijakan yang disengaja oleh pemerintah sebagai upaya pengendalian impor atau ekspor, dengan jalan mengatasi berbagai hambatan perdagangan, seperti tarif kuota, dengan tujuan melindungi industri atau dunia usaha dalam negeri dari persaingan dengan

¹ Sumadji *et al.* 2006. *Kamus Ekonomi*. Jakarta: Wacana Intelektual pp. 532

industri luar negeri². Untuk mendukung konsep proteksionisme, Friedrich List mengembangkan teori kekuatan produksi yang menekankan bahwa kemampuan untuk menghasilkan barang produksi lebih penting daripada hasil produksi itu sendiri³ sehingga proteksi terhadap industri domestik merupakan langkah yang mutlak diperlukan.

Berdasarkan definisi tersebut, penulis memahami tindakan proteksionisme sebagai tindakan yang perlu dilakukan oleh suatu negara dalam rangka melindungi maupun meningkatkan sistem ekonomi dengan jalan melakukan optimalisasi terhadap produk maupun usaha dalam negeri. Tindakan proteksi merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap eksistensi dan optimalisasi kualitas maupun kuantitas produk domestik. Karena dengan dukungan pemerintah, produk domestik dapat memiliki kesempatan bersaing yang seimbang dengan produk asing. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk domestik ini kemudian mengarah pada peningkatan pada sektor erekonomi.

- **Argumen Pendukung Proteksionisme**

Kebijakan proteksionisme memiliki sejumlah argumen yang menguatkan kebijakan tersebut sebagai suatu kebutuhan pemerintah dalam rangka melindungi sektor perekonomian dan standar kehidupan rakyat. Yang pertama adalah argumen bahwa kebijakan proteksionisme merupakan upaya perlindungan terhadap *infant industry*⁴. Argumen ini dilandasi oleh pemikiran Alexander Hamilton, Menteri Keuangan Amerika

² *Ibid.*

³ Friedrich List. *Op cit.* pp. 145

⁴ industri baru yang dapat segera menjadi kompetitif secara internasional

Serikat yang pertama, dalam Reports of of Manufactures (1791)⁵ mengungkapkan bahwa *infant industry* belum memiliki kapabilitas dan stabilitas ekonomi maupun ketrampilan manufaktur seperti industri-industri yang lebih besar sehingga apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah maka akan memperkecil kesempatan bersaing di pasar global. Argumen tersebut diperkuat oleh pendapat Friedrich List yang menyatakan bahwa kemampuan untuk menghasilkan barang produksi lebih penting daripada hasil produksi itu sendiri⁶ sehingga kebijakan yang bersifat proteksi terhadap industri domestik mutlak diperlukan.

Yang kedua adalah argumen bahwa negara yang tidak berpartisipasi dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti Amerika Serikat akan mengalami kerugian akibat tingginya jumlah produk asing yang masuk⁷. Hal tersebut dikarenakan apabila produk dari Amerika Serikat dijual di negara yang memberlakukan PPN maka produsen harus menanggung beban pajak domestik serta pajak dari negara tempat produknya dijual. Sebaliknya ketika produk yang dibuat di negara yang memberlakukan PPN dijual di Amerika Serikat, produsen tidak menanggung beban pajak dari negara tempat produknya dijual karena Amerika Serikat tidak menerapkan PPN. Oleh karena itu pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa meningkatkan prosentase pajak barang impor dipandang sebagai

⁵ Ha-Joon Chang, 30 Desember 2003. *Kicking Away The Ladder: The Real History of Free Trade*. Washington, DC: Foreign Policy In Focus diambil dari linkweb http://www.fpiif.org/reports/kicking_away_the_ladder_the_real_history_of_free_trade diakses pada 5 Desember 2012 12.09 WIB

⁶ Friedrich List, 1966. *The National System of Political Economy*. New York: Kelley [e-book] pp. 145

⁷ William G. Gale dan Benjamin H. Harris. *A VAT for United States: Part of the Solution dalam Tax Analysis 2011*. [e-book] pp. 65 diambil dari linkweb http://www.brookings.edu/~media/research/files/articles/2011/3/03%20vat%20solution%20gale%20harris/03_vat_solution_gale_harris diakses pada 18 Desember 2012 13.54 WIB

suatu kebutuhan agar produk lokal dan produk impor dapat bersaing secara seimbang dari segi harga jual.

- **Bentuk Kebijakan Proteksionisme**

Krisis ekonomi merupakan salah satu penyebab pemerintah Amerika Serikat mengambil tindakan proteksi dalam rangka meningkatkan sektor perekonomian domestik. Pasca Krisis Finansial 2008 pemerintah Amerika Serikat melakukan tindakan proteksi dalam berbagai bentuk. Proteksi dalam bentuk tarif nampak pada peningkatan prosentase bea impor panel surya dan ban dari Cina. Sedangkan proteksi dalam bentuk non tarif mayoritas bersifat kualitatif dimana produk yang masuk ke pasar domestik Amerika Serikat harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah Amerika Serikat seperti yang diberlakukan terhadap produk impor berupa bahan makanan, CPO dan rokok. Penulis mengelompokkan kebijakan proteksionisme tersebut dalam dua kelompok, yakni kebijakan proteksionisme di bidang finansial dan kebijakan proteksionisme di bidang perdagangan. Kebijakan proteksionisme di bidang finansial yang paling umum adalah dengan memberikan bantuan dana secara langsung terhadap pengusaha lokal. Kebijakan ini merupakan cara yang paling cepat untuk memulihkan perekonomian pasca krisis, namun hanya berlaku dalam jangka waktu pendek dan hanya mempengaruhi sektor ekonomi makro. Hal ini dikarenakan bantuan dana tersebut merupakan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan kedalam investasi finansial agar dapat menyeimbangkan kondisi ekonomi dalam waktu singkat. Namun karena sifatnya yang mudah berpindah, investasi finansial dapat ditarik lagi oleh pemerintah ketika sektor perekonomian telah mencapai kondisi stabil.

Kebijakan proteksionisme di bidang perdagangan yaitu berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi industri lokal dengan cara memberikan subsidi dan pengurangan prosentase pajak produk lokal serta meningkatkan prosentase pajak terhadap produk impor. Kebijakan ini seharusnya merupakan kebijakan finansial, namun karena memiliki dampak langsung yang cukup signifikan maka kemudian digolongkan dalam kebijakan perdagangan. Kebijakan proteksionisme di bidang perdagangan lainnya antara lain kebijakan untuk membeli produk lokal serta pembatasan kuota produk impor. Kebijakan ini memiliki dampak yang lebih lama dibandingkan kebijakan proteksionisme di bidang finansial karena melibatkan sektor ekonomi mikro sehingga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat.

- **Argumen Proteksionisme Finansial**

Pasca Krisis Finansial 2008 terdapat terdapat pro dan kontra mengenai penggolongan kebijakan finansial yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat pasca krisis finansial tahun 2008 kedalam bentuk kebijakan proteksinisme. Yang mendukung argumen kebijakan finansial pasca krisis sebagai bentuk proteksionisme salah satunya adalah Pascal Lamy, ketua WTO. Pada konferensi tahunan Cercle des Economistes di Perancis bulan Juli 2009 Lamy memberi peringatan mengenai bantuan dana terhadap perusahaan otomotif, pesawat dan bank sebagai bentuk subsidi dimana merupakan pelanggaran terhadap peraturan dalam WTO⁸.

⁸ Peggy Hollinger. 6 Juli 2009. *Lamy Warns Over Bank Bail-Outs* diambil dari linkweb <http://www.ft.com/cms/s/0/9e0aed86-697b-11de-bc9f-00144feabdc0.html#axzz2WBHXcT1A> diakses pada 10 Juni 2013 14.01 WIB

Selain itu juga terdapat argumen dari Andrew K Rose dan Tomasz Wieladek dimana mengungkapkan bahwa bantuan dana pemerintah terhadap bank lokal merupakan bentuk proteksionisme finansial⁹. Menurut Rose dan Wieladek, nasionalisasi bank dengan cara akuisisi ataupun pembelian surat berharga oleh pemerintah tersebut merupakan bukti adanya proteksionisme finansial karena nasionalisasi bank menyebabkan berkurangnya investasi asing pada bank yang ada pada negara tersebut.

- **Indikator Kebijakan Proteksionisme**

Untuk mengukur sejauh mana tindakan proteksionisme yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pasca Krisis Finansial 2008, penulis membagi level proteksionisme menjadi tiga yaitu proteksionis minimal, proteksionis general dan proteksionis total. Proteksionis minimal merupakan level terendah bentuk proteksi dimana tingkat hambatannya paling rendah atau tidak ada hambatan. Proteksionis general merupakan bentuk proteksi yang biasa dilakukan oleh suatu negara ketika terjadi krisis. Pada level ini penulis mengacu pada historis kebijakan proteksionis yang pernah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Proteksionisme total merupakan bentuk proteksi yang menghalangi masuknya produk maupun investasi dari luar lingkup negaranya.

Sedangkan indikator untuk mengukur sejauh mana tindakan proteksionisme yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pasca Krisis Finansial 2008 dibagi dalam dua bentuk, yaitu sektor finansial dan sektor perdagangan. Masing-masing bentuk tersebut memiliki dua macam indikator untuk mengukur sejauh mana tindakan proteksionisme.

⁹ Andrew K Rose dan Tomasz Wieladek. *Financial Protectionism* diambil dari linkweb <http://www.voxeu.org/article/financial-protectionism-new-evidence-bank-bailouts> diakses pada 10 Juni 2013 14.01 WIB

Indikator pertama adalah bentuk kebijakan finansial yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan pemerintah tersebut berada pada level proteksionis minimal apabila pemerintah Amerika Serikat tidak membatasi pihak asing yang hendak melakukan investasi di Amerika Serikat. Investasi terhadap sektor finansial berada pada level proteksionis general, sedangkan kebijakan yang mencegah pihak asing yang hendak melakukan investasi di Amerika Serikat berada pada level proteksionis total. Pembagian indikator ini didasarkan pada definisi salah satu instrumen kebijakan fiskal yaitu kebijakan anggaran defisit yang mengatur alokasi pengeluaran pemerintah kedalam sektor investasi agar dapat menjadi stimulus sektor ekonomi ketika terjadi krisis¹⁰.

Indikator kedua adalah jangka waktu berlakunya kebijakan finansial yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat pasca Krisis Finansial 2008. Kebijakan pemerintah tersebut berada pada level proteksionis minimal apabila kebijakan tersebut memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun. Kebijakan yang memiliki jangka waktu antara satu hingga dua tahun berada pada level proteksionis general, sedangkan kebijakan yang memiliki jangka waktu lebih dari dua tahun atau berlaku permanen berada pada level proteksionis total. Pembagian indikator ini didasarkan pada jangka waktu pinjaman jangka pendek dari IMF, yaitu the Precautionary and Liquidity Line (PLL). PLL merupakan pinjaman dari IMF berupa investasi asing terhadap negara-negara yang terkena dampak krisis¹¹.

Pada sektor perdagangan juga terdapat dua macam indikator untuk mengukur seberapa jauh kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pasca Krisis Finansial 2008. Indikator pertama adalah bentuk hambatan perdagangan yang

¹⁰ Imamul Arifin dan Gina Hadi W. 2009. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: Grafindo. pp. 86

¹¹ International Monetary Fund. *The IMF's Precautionary and Liquidity Line (PLL)* diambil dari linkweb www.imf.org/external/np/exr/facts/pll.htm diakses pada 10 April 2013 7.54 WIB

dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Hambatan tersebut berada pada level proteksionis minimal apabila berupa hambatan prosedural administrasi dan pabean. Peningkatan bea impor dan pembatasan kuota produk impor berada pada level proteksionis general, sedangkan hambatan berupa standardisasi kualitas, dumping dan anti dumping serta subsidi ekspor berada pada level proteksionis total. Pembagian indikator ini didasarkan pada tingkat hambatan yang timbul dari kebijakan pemerintah. Proses administrasi pabean merupakan hal yang paling umum dilakukan oleh setiap negara terhadap produk dari luar lingkup negaranya sehingga tingkat hambatannya sangat kecil. Sedangkan pajak dan kuota merupakan bentuk hambatan perdagangan yang paling sering dilakukan oleh Amerika Serikat untuk membatasi produk impor yang masuk ke pasar domestiknya. Kedua hambatan ini masih menjadi isu utama dalam WTO sehingga beberapa negara menggunakan bentuk hambatan yang bersifat kualitatif. Hambatan kualitatif belum diatur dalam agenda WTO sehingga beberapa negara menerapkan berbagai kualifikasi serta standar tertentu terhadap produk asing yang masuk. Selain itu terdapat kebijakan perdagangan yang dinilai ekstrim namun masih dilakukan oleh beberapa negara seperti dumping dan subsidi ekspor. Kedua kebijakan tersebut termasuk dalam kebijakan yang dilarang diberlakukan berdasarkan kesepakatan WTO, dan untuk mengatasinya biasanya suatu negara menerapkan pajak anti dumping (countervailing duty).

Indikator kedua adalah peningkatan prosentase bea impor dan jumlah kuota produk impor setelah Krisis Finansial 2008. Kebijakan tersebut berada pada level proteksionis minimal apabila tidak terjadi peningkatan prosentase bea impor dan jumlah kuota produk impor pasca krisis. Peningkatan prosentase bea impor dan jumlah kuota produk impor pasca krisis hingga lebih 100% dan berangsur kembali pada prosentase semula selama lima

tahun berada pada level proteksionis general, sedangkan peningkatan prosentase bea impor dan jumlah kuota produk impor pasca krisis hingga lebih dari 100% dan tidak ada tanda-tanda penurunan prosentase setelah tahun pertama berada pada level proteksionis total. Pembagian indikator ini didasarkan pada historis kebijakan proteksionisme Amerika Serikat dimana meskipun meningkatkan pajak impor hingga lebih dari 100%, namun prosentase tersebut berangsur berkurang setiap tahun selama lima tahun. Seperti peningkatan prosentase pajak motor berat impor dari 4,4% menjadi 49,4% pada tahun 1983¹². Prosentase tersebut berlaku untuk tahun pertama diberlakukannya kebijakan tersebut yang kemudian berkurang menjadi 39,4% pada tahun kedua, 24,4% pada tahun ketiga, 19,4% pada tahun keempat, 14,4% pada tahun kelima dan kembali 4,4% setelah tahun kelima¹³.

Tabel 1.1 Indikator Kebijakan Proteksionisme

Indikator		Proteksionis Minimal	Proteksionis General	Proteksionis Total
Finansial	Bentuk kebijakan yang digunakan	Investasi asing tidak dibatasi	Investasi pemerintah di sektor finansial	Mencegah masuknya investasi asing
	Batas waktu berlakunya kebijakan	Kurang dari satu tahun setelah dibentuk	Satu hingga dua tahun setelah dibentuk	Lebih dari dua tahun setelah dibentuk/permanen
Perdagangan	Bentuk hambatan yang digunakan	Hambatan prosedural administrasi dan pabean	Bea impor, Pembatasan kuota impor	Standardisasi kualitas, Dumping dan Anti Dumping, Subsidi Ekspor
	Peningkatan prosentase bea impor dan kuota	Tidak meningkat	Meningkat $\geq 100\%$ dan berangsur	Meningkat $\geq 100\%$ dan tidak ada tanda-

¹² Daniel Klein. 12 Januari 1984. *Taking America for a Ride: The Politics of Motorcycle Tariffs* dalam CATO Policy Analysis no.12 diambil dari linkweb <http://www.cato.org/pubs/pas/pa032.html> diakses pada 27 Desember 2012 10.45 WIB

¹³ *Ibid.*

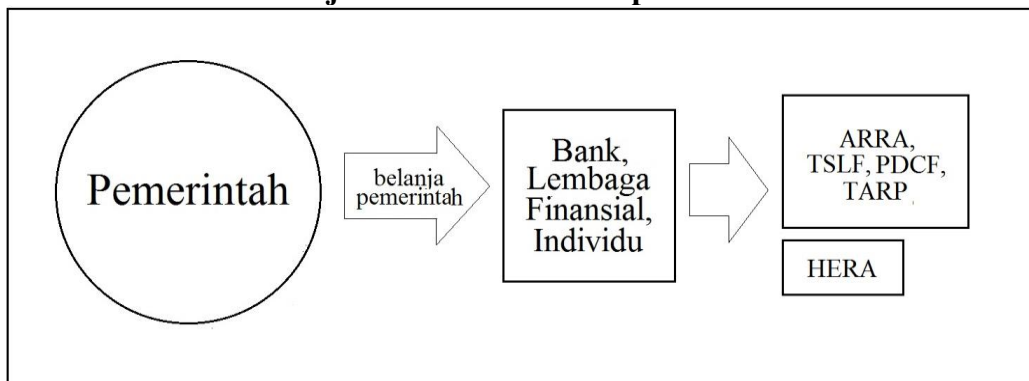
	impor pasca krisis		kembali pada prosentase semula selama lima tahun	tanda penurunan prosentase setelah tahun pertama
--	--------------------	--	--	--

Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat Pasca Krisis Finansial 2008

- **Sektor Finansial**

Kebijakan proteksionisme pada sektor finansial mayoritas merupakan program stimulus finansial yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menjamin likuiditas dan stabilitas sektor finansial. Penulis menggolongkan program stimulus finansial tersebut sebagai kebijakan proteksionisme karena dana untuk program tersebut berasal dari pos belanja pemerintah yang dialokasikan untuk investasi sebagai stimulasi ekonomi pasca krisis.

Skema 1.1 Kebijakan Proteksionisme pada Sektor Finansial



Ket.: skema merupakan visualisasi penulis terhadap konsep

1. The Economic Stimulus Act of 2008

The Economic Stimulus Act of 2008 merupakan undang-undang yang menyediakan berbagai macam stimulus ekonomi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi Amerika

Serikat pada tahun 2008 serta untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi yang berlaku sejak tanggal 13 Februari 2008. Stimulus ekonomi tersebut antara lain adalah pemberian potongan pajak terhadap wajib pajak kelas bawah dan kelas menengah di Amerika Serikat, pemberian insentif pajak terhadap investasi bisnis, serta meningkatkan batas pinjaman pada Federal Housing Administration (FHA)¹⁴. FHA merupakan badan pemerintah Amerika Serikat yang berfungsi sebagai penjamin pinjaman bank ataupun lembaga swasta yang diperuntukkan membeli dan membangun rumah.

2. Term Securities Lending Facility (TSLF) dan Primary Dealer Credit Facility (PDCF)

TSLF dan PDCF merupakan fasilitas yang dikeluarkan oleh Federal Reserve dalam rangka mendorong likuiditas pasar finansial dan pasar agunan lain agar dapat meningkatkan kinerja sektor finansial Amerika Serikat. TSLF merupakan fasilitas pinjaman mingguan yang berlaku sejak tanggal 11 Maret 2008¹⁵. Fasilitas ini menawarkan surat berharga milik the System Open Market Account (SOMA) sebagai pinjaman dengan jangka waktu satu bulan yang diberikan kepada primary dealer¹⁶ yang ditentukan berdasarkan sistem lelang. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2008 Federal Reserve mengumumkan PDCF yang merupakan fasilitas sumber dana cadangan terhadap primary dealer saat tidak tersedia dana di pasar finansial¹⁷. Dengan fasilitas ini, primary dealer dapat meminjam dana dengan

¹⁴ U.S. Congress. *H.R. 5140 (110th): Economic Stimulus Act of 2008* diambil dari linkweb <http://www.govtrack.us/congress/bills/110/hr5140/text> diakses pada 10 April 2013 7.54 WIB

¹⁵ Board of Governors of the Federal Reserve System. *Terms Security Lending Facility* diambil dari linkweb <http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/tslf.htm> diakses pada 10 April 2013 7.54 WIB

¹⁶ Perusahaan yang membeli surat berharga (sekuritas) milik pemerintah secara langsung dari pemerintah dengan tujuan dijual kembali ke pihak lain. Di Amerika Serikat, primary dealer adalah bank atau agen pialang sekuritas yang memiliki ijin untuk bertransaksi langsung dengan Federal Reserve

¹⁷ Ibid. *Primary Dealer Credit Facility (PDCF)* diambil dari linkweb http://www.federalreserve.gov/newsevents/reform_pdcf.htm diakses pada 10 April 2013 7.54 WIB

menggunakan berbagai macam bentuk jaminan termasuk jaminan yang melibatkan pihak ketiga seperti hutang KPR¹⁸.

3. The Housing and Economic Recovery Act of 2008 (HERA)

Pada tanggal 30 Juli 2008 pemerintah Amerika Serikat meratifikasi the Housing and Economic Recovery Act of 2008 (HERA) yang berlaku hingga tanggal 30 September 2011¹⁹. Undang-undang ini dirancang untuk mengatasi krisis akibat kegagalan kredit perumahan²⁰ dengan cara memberikan fasilitas yang memudahkan rakyat Amerika Serikat untuk mendapatkan rumah baru ataupun rumah mereka yang mengalami penyitaan. Undang-undang ini memberi perubahan yang luas dan signifikan terhadap beberapa program dari HUD yang berlaku mulai dari tanggal 24 November 2008²¹. Program tersebut antara lain program perumahan rakyat (Public Housing), program kupon untuk pemilik atau penyewa rumah (Tenant-Based Voucher), dan program kupon untuk pelaku industri perumahan (Project-Based Voucher). HERA memiliki beberapa undang-undang pendukung, antara lain Housing Assistance Tax Act of 2008, FHA Modernization Act of 2008, HOPE for Homeowners Act of 2008, dan Federal Housing Finance Regulatory Reform Act of 2008.

Housing Assistance Tax Act of 2008 merupakan undang-undang yang merevisi berbagai ketentuan perpajakan untuk mendorong kepemilikan rumah serta adanya

¹⁸ Federal Reserve Bank of New York. *Primary Dealers Credit Facility: Frequently Asked Question* diambil dari linkweb http://www.newyorkfed.org/markets/pdcf_faq.html diakses pada 4 Januari 2013 13.22 WIB

¹⁹ Federal Housing Administration. *HOPE for Homeowners: How does the HOPE Act Work?* diambil dari linkweb http://www.fha.com/hope_for_homeowners.cfm diakses pada 4 Januari 2013 13.22 WIB

²⁰ U.S Department of Housing and Urban Development. *Housing and Economic Recovery Act of 2008 FAQ* diambil dari linkweb <http://www.hud.gov/news/recoveryactfaq.cfm> diakses pada 4 Januari 2013 13.22 WIB

²¹ Federal Register. 15 Mei 2012. *The Housing and Economic Recovery Act of 2008 (HERA): Changes to the Section 8 Tenant-Based Voucher and Section 8 Project-Based Voucher Programs* diambil dari linkweb <https://www.federalregister.gov/articles/2012/05/15/2012-11638/the-housing-and-economic-recovery-act-of-2008-hera-changes-to-the-section-8-tenant-based-voucher-and> diakses pada 15 April 2013 12.48 WIB

perumahan yang terjangkau. Undang-undang ini fokus terhadap kelompok investasi, dimana memberikan sejumlah revisi terhadap pajak kredit baik untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, obligasi perumahan maupun pajak KPR²². Undang-undang ini juga memungkinkan bunga bebas pajak dari obligasi perumahan bebas dari Alternative Minimum Tax (AMT)²³. Melalui undang-undang ini pemerintah Amerika Serikat memberi insentif pajak yang berkaitan dengan perumahan, seperti kredit untuk pembeli rumah pertama kali dan pengurangan standar pajak properti²⁴.

FHA Modernization Act of 2008 merupakan undang-undang yang memberi fasilitas bantuan pinjaman KPR yang diasuransikan oleh FHA. Melalui undang-undang ini kepercayaan publik terhadap Freddie Mac dan Fannie Mae akan meningkat karena FHA memberi jaminan terhadap KPR dari kalangan sub-prime²⁵. Undang-undang ini juga mencakup peningkatan prosentase penjaminan FHA terhadap kredit perumahan serta memberi kesempatan terhadap kreditur swasta untuk berpartisipasi²⁶.

HOPE for Homeowners Act of 2008 merupakan undang-undang yang dirancang untuk mencegah pemilik rumah mengalami gagal bayar maupun penyitaan melalui program KPR yang terjangkau dan bersuku bunga tetap²⁷. Undang-undang ini memberi kewenangan

²² William Perez. 1 Agustus 2008. *Housing Assistance Tax Act of 2008* diambil dari linkweb <http://taxes.about.com/b/2008/08/01/housing-assistance-tax-act-of-2008.htm> diakses pada 28 April 2013 8.13 WIB

²³ Pajak pendapatan

²⁴ Tax Policy Center. *Mortgage Crisis: What is the Housing Assistance Tax Act of 2008?* diambil dari linkweb <http://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/state-local/mortgage-crisis/2008act.cfm> diakses pada 28 April 2013 8.13 WIB

²⁵ Jean Scheid. *FHA Modernization Act* diambil dari linkweb http://mortgage.lovetoknow.com/FHA_Modernization_Act diakses pada 28 April 2013 8.13 WIB

²⁶ *Ibid.*

²⁷ FHA. *HOPE for Homeowner, How Does the HOPE Act Help?* diambil dari linkweb http://www.fha.com/hope_for_homeowners.cfm diakses pada 28 April 2013 8.13 WIB

terhadap FHA untuk memberi asuransi terhadap kredit perumahan untuk kelas subprime²⁸. Program ini membantu debitur dari kelas subprime yang mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman mereka dengan cara memberikan suku bunga tetap terhadap kredit perumahan selama 30 tahun.

Federal Housing Finance Regulatory Reform Act of 2008 merupakan undang-undang yang mengubah regulasi terhadap government sponsored enterprises (GSEs)²⁹ yang bergerak di bidang perumahan. Melalui undang-undang ini pemerintah Amerika Serikat membentuk badan federal bernama Federal Housing Finance Agency (FHFA). FHFA merupakan sebuah badan independen yang berisi staff dari Office of Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO), Federal Housing Finance Board (FHFB) dan kantor pelayanan dari GSE yang berada dalam naungan HUD³⁰. Badan ini bertugas sebagai pengawas dan regulator terhadap pelaku utama dalam pasar KPR Amerika Serikat, yaitu Fannie Mae, Freddie Mac, dan bank-bank yang tergabung dalam Federal Home Loan Bank. Tujuan dibentuknya FHFA adalah untuk mendorong kesehatan finansial para pelaku utama dalam pasar KPR, mendukung pengembangan perumahan yang terjangkau bagi rakyat, serta mendukung stabilitas dan likuiditas pasar KPR.

4. The Emergency Economic Stabilization Act of 2008 (EESA) dan The Troubled Assets Relief Program (TARP)

EESA merupakan undang-undang yang memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk membeli dan menjamin berbagai aset yang bermasalah secara finansial dengan tujuan

²⁸ U.S Department of Housing and Urban Development. *Programs of HUD* diambil dari linkweb <http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=ProgramsofHUD.pdf> diakses pada 4 Januari 2013 13.22 WIB

²⁹ perusahaan jasa keuangan yang dibuat oleh Kongres Amerika Serikat yang berfungsi untuk meningkatkan aliran kredit ke sektor ditargetkan agar lebih efisien dan transparan serta untuk mengurangi risiko investor

³⁰ Federal Housing Finance Agency. *About FHFA* diambil dari linkweb <http://www.fhfa.gov/Default.aspx?Page=4> diakses pada 17 April 2013 11.59 WIB

menciptakan stabilitas dan mencegah gangguan dalam sistem keuangan³¹. Undang-undang ini menjalankan misinya dengan membentuk TARP, program yang dirancang untuk menstabilkan sistem keuangan selama krisis tahun 2008³² dengan cara membeli MBS dari berbagai institusi finansial yang menjamin KPR. Tujuan dari pembelian ini adalah untuk menjamin likuiditas pasar finansial serta memperkuat sektor finansial ketika terjadi Krisis Finansial 2008. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan likuiditas rumah sitaan yang jumlahnya meningkat drastis pasca Krisis Finansial 2008 dengan cara membeli kembali aset tersebut.

Program ini terdiri atas beberapa program lain, salah satunya adalah Capital Purchase Program (CPP) yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat. CPP merupakan program yang memungkinkan adanya investasi pemerintah dalam bentuk pembelian saham prioritas terhadap bank maupun lembaga keuangan yang berkualifikasi³³. Tujuan dibentuknya program ini adalah untuk menstabilkan sistem keuangan dengan cara menyediakan modal untuk lembaga keuangan di Amerika Serikat. Dengan adanya modal dalam bank maupun lembaga keuangan, diharapkan institusi tersebut dapat meningkatkan jumlah debitur sehingga dapat menstimulasi sektor finansial.

5. Term Asset-Backed Securities Lending Facilities (TALF)

³¹ *H.R. 1424 (110th): Emergency Economic Stabilization Act of 2008* diambil dari linkweb <http://www.govtrack.us/congress/bills/110/hr1424#overview> diakses pada 28 April 2013 8.13 WIB

³² U.S Department of Treasury. *About TARP* diambil dari linkweb <http://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/about-tarp/Pages/default.aspx#> diakses pada 28 Desember 2012 16.52 WIB

³³ U.S Department of Treasury. *Capital Purchase Program* diambil dari linkweb <http://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/TARP-Programs/bank-investment-programs/cap/Pages/overview.aspx> diakses pada 28 Desember 2012 16.52 WIB

TALF merupakan fasilitas yang berada didalam naungan TARP yang diresmikan oleh Federal Reserve pada tanggal 25 November 2008³⁴. Fasilitas ini berfungsi sebagai fasilitas pendanaan untuk membantu memenuhi kebutuhan kredit melalui penerbitan asset-backed securities (ABS) dengan menggunakan jaminan berupa pinjaman seperti pinjaman pengusaha kecil, pinjaman kendaraan bermotor, pinjaman mahasiswa, dan pinjaman kartu kredit, dengan berbagai bentuk terhadap semua jenis konsumen³⁵. Fasilitas ini ditutup untuk penyaluran kredit baru terhadap penerbitan commercial mortgage-backed securities (CMBS) pada tanggal 30 Juni 2010, dan untuk perpanjangan pinjaman baru terhadap semua jenis agunan pada tanggal 31 Maret 2010³⁶.

6. Automotive Industry Financing Program (AIFP)

AIFP merupakan program yang berada dibawah naungan TARP yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 19 Maret 2009³⁷. Tujuan dari program ini adalah untuk menghindari keruntukan finansial pasca krisis terhadap industri otomotif domestik di Amerika Serikat. Melalui program ini, Kementerian Keuangan Amerika Serikat memberi pinjaman melalui seleksi kualifikasi. General Motors dan Chrysler merupakan perusahaan otomotif yang lolos seleksi sebagai penerima dana AIFP³⁸ karena selain memiliki potensi yang besar untuk bertahan dari dampak krisis, kedua perusahaan tersebut merupakan

³⁴ Boards of Governors of the Federal Reserve System. *Term Asset-Backed Securities Loan Facility* diambil dari linkweb <http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/talf.htm> diakses pada 4 Januari 2013 13.22 WIB

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Federal Reserve bank of New York. *Term Asset-Backed Securities Loan Facility* diambil dari linkweb <http://www.newyorkfed.org/markets/talf.html> diakses pada 29 April 2013 10.28 WIB

³⁷ U.S Department of the Treasury. *Automotive Industry Finance Program* diambil dari linkweb <http://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/programs/Other%20Programs/aifp/Pages/autoprogram.aspx> diakses pada 7 Januari 2013 13.39 WIB

³⁸ *Overview of the AIFP (Automotive Industry Finance Program)* diambil dari linkweb <http://www.finweb.com/loans/overview-of-the-aifp-automotive-industry-financing-program.html> diakses pada 7 Januari 2013 13.39 WIB

perusahaan memiliki tingkat penjualan yang tinggi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga kerugian finansial perusahaan tersebut berdampak langsung terhadap sektor ekonomi Amerika Serikat.

7. American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA)

ARRA merupakan undang-undang yang menyediakan program bantuan finansial terhadap industri yang paling terkena dampak krisis yang diratifikasi pada tanggal 19 Februari 2009³⁹. Undang-undang ini memiliki tiga tujuan utama yaitu menekan angka pengangguran, memacu kegiatan ekonomi dan investasi jangka panjang serta mendorong akuntabilitas dan transparansi pengeluaran pemerintah. Melalui undang-undang ini pemerintah Amerika Serikat menyediakan dana sebesar USD 787 milyar untuk memberikan insentif pajak, pendanaan program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan serta mendanai berbagai macam pinjaman pemerintah⁴⁰.

- **Sektor Perdagangan**

Dalam sektor perdagangan terdapat kebijakan *buy American* bertujuan untuk mendorong masyarakat Amerika Serikat agar membeli produk domestik serta penggunaan bahan baku lokal⁴¹. Kebijakan tersebut juga mewajibkan penggunaan material dan bahan baku lokal dalam setiap pembelanjaan proyek pemerintah, terutama proyek-proyek yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur wajib menggunakan besi, baja dan material

³⁹ U.S Government's Official Website. *The Recovery Act* diambil dari linkweb http://www.recovery.gov/About/Pages/The_Act.aspx diakses pada 6 Januari 2013 16.45 WIB

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ The Economist. 5 Februari 2009. *The Return of Economic Nationalism* diambil dari linkweb http://www.economist.com/node/13061443?story_id=13061443 diakses pada 18 Mei 2011 13.38 WIB

lain yang diproduksi di Amerika Serikat⁴². Dalam sektor perdagangan, kebijakan tersebut direalisasikan dengan memberi ataupun menambah restriksi terhadap berbagai komoditas ekspor dari negara tertentu.

Pasca Krisis Finansial 2008, nampak bahwa hambatan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat tidak hanya berupa pajak dan kuota. Meskipun pemerintah Amerika Serikat masih meningkatkan prosentase pajak impor, namun terdapat beberapa hambatan perdagangan yang bersifat kualitatif dengan melibatkan isu kesehatan maupun lingkungan. Bentuk hambatan kualitatif merupakan langkah yang memiliki resiko lebih kecil dibandingkan dengan menaikkan prosentase pajak impor karena standarisasi produk impor tidak disebutkan sebagai hambatan perdagangan dalam kesepakatan WTO.

1. The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act of 2009

Dalam the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act of 2009 pasal 907(a) yang diratifikasi pada tanggal 22 Juni 2009⁴³ menyebutkan bahwa rokok yang beredar di pasar domestik Amerika Serikat hanya rokok yang tidak mengandung bahan perasa tambahan baik alami maupun buatan selain tembakau dan menthol⁴⁴. Undang-undang tersebut juga menggolongkan rokok yang memiliki kandungan selain tembakau dan menthol dalam kategori *flavored cigarette* dimana mengandung bahan perasa tambahan dari rempah, strawberry, anggur, jeruk, cengkeh, kayu manis, nanas, vanilla, kelapa,

⁴² Daniel Ikenson. 5 Februari 2009. *Deciphering the 'Buy American' Dispute* dalam CATO Library diambil dari linkweb <http://www.cato-at-liberty.org/deciphering-the-buy-american-dispute/> diakses pada 17 Mei 2011 21.32 WIB

⁴³ U.S Department of Health and Human Services. 22 Juni 2009. *Family Smoking Prevention and Federal Retirement Reform*. diambil dari linkweb <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ31/pdf/PLAW-111publ31.pdf> diakses pada 24 Juni 2010 14.35 WIB

⁴⁴ *Ibid.*

licorice, kakao, coklat, ceri, dan kopi⁴⁵. Perundangan tersebut didukung dengan pernyataan yang dibuat oleh Food and Drugs Association (FDA), badan pengawas makanan dan obat-obatan milik Amerika Serikat, bahwa bahan perasa tambahan dalam *flavored cigarette* mengandung zat adiktif yang dapat menimbulkan efek kecanduan⁴⁶. Undang-undang ini memiliki beberapa kejanggalan antara lain upaya membatasi peredaran *flavored cigarette* dengan menyebutkan bahan tambahan yang digunakan oleh rokok yang berasal dari luar Amerika Serikat dan memasukkan rokok menthol dalam kategori sebagai *natural flavor*. Selain itu, yang merupakan zat adiktif dalam rokok adalah nikotin yang berada didalam tembakau⁴⁷ dimana merupakan bahan dasar rokok, bukan didalam bahan perasa tambahan dalam *flavored cigarette* seperti yang disebutkan oleh FDA.

2. Penambahan Prosentase Pajak Barang Impor

Pada tanggal 11 September 2009 pemerintah Amerika Serikat memperketat peredaran ban dari Cina dengan menambah pajak impor sebesar 35% diluar bea masuk sebesar 4% yang sudah diterapkan sebelumnya⁴⁸. Selain untuk membatasi jumlah ban impor dari Cina, peningkatan prosentase pajak tersebut juga dimaksudkan untuk membantu meningkatkan produktivitas industri ban lokal serta mengurangi jumlah pengangguran. Tidak lama kemudian, pemerintah Amerika Serikat kembali melakukan restriksi terhadap produk dari Cina yang terlihat dari peningkatan bea impor panel tenaga surya dari Cina menjadi 31%

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Foods and Drugs Association. *Flavored Tobacco* diambil dari linkweb <http://www.fda.gov/TobaccoProducts/ProtectingKidsfromTobacco/FlavoredTobacco/default.htm> diakses pada 24 Juni 2010 14.35 WIB

⁴⁷ National Institute of Drugs Abuse. *Is Nicotine Addictive?* Diambil dari linkweb <http://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/tobacco-addiction/nicotine-addictive> diakses pada 24 Juni 2010 14.35 WIB

⁴⁸ Edmund L. Andrews. 11 September 2009. *U.S Adds Tariffs on Chinese Tires* diambil dari linkweb http://www.nytimes.com/2009/09/12/business/global/12tires.html?_r=1&scp=1&sq=chinese%20tires&st=cs diakses pada 18 Desember 2012 13.54 WIB

setelah dua bulan sebelumnya mengenakan tarif sebesar kurang dari 4%⁴⁹. Pajak tarif ini diberlakukan sejak tanggal 26 September 2009 dan berlaku surut hingga impor yang telah terjadi sejak tiga bulan (90 hari) sebelumnya⁵⁰. Pajak tersebut diberlakukan setelah adanya isu subsidi ekspor terhadap perusahaan-perusahaan panel tenaga surya di Cina dari bank pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kompetisi secara tidak adil karena harga produk panel tenaga surya dari Cina menjadi jauh lebih murah dibandingkan produk industri domestik Amerika Serikat.

Pemerintah Amerika Serikat kembali memberi restriksi terhadap produk impor dari Cina dengan memberlakukan pajak sebesar 36,53% hingga 99,14% terhadap pipa baja pada tanggal 6 November 2009⁵¹. Kebijakan tersebut termasuk pajak antidumping yang merupakan tindak lanjut terhadap petisi yang diajukan oleh United Steel Union yang terdiri atas the United States Steel Corp, Maverick Tube Corp, Evraz Rocky Mountain Steel, TMK IPSCO, V&M Star LLP, V&M TCA dan Wheatland Tube Corp⁵². Petisi tersebut berisi tuduhan bahwa pemerintah Cina telah memberikan subsidi dan preferensi prosentase pajak terhadap produsen baja di negaranya serta membebaskan perusahaan tersebut dari aturan mengenai tenaga kerja dan lingkungan⁵³ sehingga membuat harga jual baja dari Cina di pasar internasional jauh lebih murah daripada harga jual baja dari Eropa maupun

⁴⁹ Keith Bradsher. 30 September 2011. *Solar Panel Tariffs May Further Strain U.S-China Trade* diambil dari linkweb <http://www.nytimes.com/2009/10/01/business/global/01tariff.html?pagewanted=all> diakses pada 18 Desember 2012 13.54 WIB

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Sarah O'Connor. 6 November 2009. *U.S. Slaps Anti-Dumping Duties on Steel Pipe Import from China* dalam Financial Times diambil dari linkweb <http://www.ft.com/cms/s/0/ed96c91e-ca75-11de-a3a3-00144feabdc0.html#axzz2I1Ekj12I> diakses pada 15 Januari 2013 12.52 WIB

⁵² Xinhua. 10 April 2010. *U.S Slaps Anti-Dumping Duties on Chinese Steel Pipe* diambil dari linkweb http://www.china.org.cn/business/2010-04/10/content_19784666.htm diakses pada 15 Januari 2013 12.52 WIB

⁵³ Leo Cendrowicz. 25 April 2009. *Steel Wars: Europe and the U.S Accuse China of Dumping* dalam Time World Online diambil dari linkweb <http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1893784,00.html> diakses pada 14 Januari 2013 16.53 WIB

Amerika Serikat. Akibatnya, total pipa baja impor dari Cina mencapai 30% di pasar domestik Amerika Serikat, sedangkan produsen baja di Amerika Serikat mengalami penurunan permintaan dari produsen otomotif, kapal dan alat berat⁵⁴.

3. Food Safety Enhancement Act of 2009

Pada tanggal 30 Juli 2009 pemerintah Amerika Serikat meratifikasi the Food Safety Enhancement Act of 2009 dimana memberi kewenangan terhadap FDA untuk mengatur dan mengawasi perkembangan industri makanan mulai dari proses penanaman hingga produksi⁵⁵. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa makanan impor yang beredar di Amerika Serikat juga harus memenuhi standar yang diberlakukan terhadap produk lokal⁵⁶. Undang-undang tersebut kemudian diperkuat dengan Food Safety Modernization Act of 2010 yang diratifikasi pada tanggal 4 Januari 2011 yang bertujuan untuk mencegah masuknya penyakit yang tersebar melalui makanan yang beredar di Amerika Serikat⁵⁷. Undang-undang ini memperkuat fungsi pengawasan FDA terhadap industri pangan dengan mengharuskan industri makanan untuk menjamin keamanan produknya dengan memenuhi standar sistem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) serta sanitary and phytosanitary (SPS). Sebelumnya, ketentuan mengenai impor bahan makanan diatur dalam Bioterrorism Act of 2002.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Lyndsey Layton. 31 Juli 2009. *House Approves Food Safety Bill, Law Would Expand FDA's Power* dalam The Washington Post diambil dari linkweb <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/30/AR2009073003271.html?hpid=topnews> diakses pada 14 Januari 2013 16.53 WIB

⁵⁶ The Washington Post. 31 Juli 2009. *Food Safety Enhancement Act of 2009: The Details* diambil dari linkweb <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/30/AR2009073004098.html> diakses pada 21 Januari 2013 14.29 WIB

⁵⁷ U.S Food and Drugs Administration. *Background on the FDA Food Safety Modernization Act (FSMA)* diambil dari linkweb <http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm239907.htm> diakses pada 21 Januari 2013 13.19 WIB

Analisa Indikator Sejauh Mana Proteksionisme Amerika Serikat Pasca Krisis Finansial 2008

Dengan menggunakan tabel indikator diatas, penulis menggolongkan bentuk proteksionisme yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pasca Krisis Finansial 2008 kedalam berdasarkan spesifikasi level proteksionisnya. Pada sektor finansial terdapat dua bentuk indikator yaitu bentuk kebijakan yang digunakan dan batas waktu berlakunya kebijakan tersebut. Pada indikator pertama, kebijakan finansial yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat berada pada level proteksionis general karena kebijakan finansial Amerika Serikat merupakan alokasi belanja pemerintah kedalam bentuk investasi terhadap sektor finansial. Investasi tersebut dibagi dalam dua bentuk yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Penggolongan ini didasarkan pada keterkaitan antara sasaran dalam kebijakan tersebut dengan pihak yang menerima dana dari pemerintah. Yang termasuk dalam investasi langsung adalah undang-undang ARRA dan program TSLF, PDCF serta TARP. Sedangkan yang termasuk dalam investasi tidak langsung adalah undang-undang HERA.

Pada indikator kedua, kebijakan finansial yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat berada pada level proteksionis general dan proteksionis total. Hal tersebut disebabkan terdapat undang-undang maupun program yang mencantumkan waktu berlakunya yakni antara satu hingga dua tahun setelah diratifikasi atau dibentuk, namun ada pula undang-undang dan program yang tidak mencantumkan waktu berlakunya. Undang-undang dan program yang termasuk dalam kebijakan proteksionis adalah program TSLF, PDCF, TALF dan undang-undang HERA. TSLF dibuka pada tanggal 11 Maret 2008, PDCF pada tanggal 17 Maret 2008. Kedua program tersebut ditutup pada tanggal 1

Februari 2010. TALF diresmikan pada tanggal 25 November 2008 dan ditutup pada tanggal 30 Juni 2010. Sedangkan undang-undang dan program yang termasuk dalam kebijakan proteksionisme total adalah program TARP dan AIFP serta undang-undang ARRA dan HERA. Program TARP dibuka pada tanggal 3 Oktober 2008, program AIFP dibentuk pada tanggal 19 Maret 2009 dan undang-undang ARRA berlaku sejak tanggal 19 Februari 2009. HERA berlaku sejak tanggal 30 Juli 2008 hingga tanggal 30 September 2011.

Pada sektor perdagangan terdapat dua bentuk indikator yaitu bentuk hambatan yang digunakan dan perbandingan prosentase bea impor sebelum dan setelah krisis. Pada indikator pertama, kebijakan perdagangan yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat berada pada level proteksionis general dan proteksionis total. Hal tersebut dikarenakan terdapat peningkatan prosentase bea impor yang terletak pada level proteksionis general dan kebijakan standarisasi produk impor yang terletak pada level proteksionis total. Peningkatan prosentase bea impor tersebut dialami oleh produk produk ban, panel surya dan pipa baja dari Cina. Sedangkan kebijakan standarisasi produk impor antara lain adanya larangan peredaran rokok impor melalui the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act of 2009 serta adanya syarat terhadap produk makanan impor memenuhi standar HACCP dan SPS melalui the Food Safety Enhancement Act of 2009.

Pada indikator kedua, kebijakan perdagangan yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat berada pada level proteksionis total karena terjadi penambahan prosentase bea impor lebih dari 100% setelah terjadi krisis. Pertambahan tersebut antara lain tambahan pajak sebesar 35% diluar bea impor sebesar 4% terhadap ban dari Cina, peningkatan bea impor panel surya dari Cina dari 4% menjadi 31%, dan peningkatan bea impor pipa baja dari Cina yang semula 13% menjadi 36,53% hingga 99,14%.

Tabel 1.2 Hasil Analisa Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat Pasca Krisis Finansial 2008

Indikator		Proteksi onis Minimal	Proteksionis General	Proteksionis Total
Finansial	Bentuk kebijakan yang digunakan		Investasi pemerintah di sektor finansial ✓ Investasi langsung: ARRA, TSLF, PDCF, TARP ✓ Investasi tidak langsung: HERA	
	Batas waktu berlakunya kebijakan		Satu hingga dua tahun setelah program/UU tersebut dibentuk/ diratifikasi ✓ TSLF dibuka pada tanggal 11 Maret 2008, PDCF pada tanggal 17 Maret 2008. Ditutup pada tanggal 1 Februari 2010 ✓ TALF diresmikan pada tanggal 25 November 2008, ditutup pada tanggal 30 Juni 2010	Lebih dari dua tahun atau tidak ada batas waktu berlakunya UU/ program tersebut ✓ HERA berlaku sejak tanggal 30 Juli 2008 hingga tanggal 30 September 2011 ✓ TARP dibuka pada tanggal 14 Oktober 2008 ✓ AIFP dibentuk pada tanggal 19 Maret 2009 ✓ ARRA berlaku sejak tanggal 19 Februari 2009
Perdagangan	Bentuk hambatan yang digunakan		Peningkatan bea impor ✓ produk ban, panel surya dan pipa baja dari Cina	Standardisasi Produk ✓ the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act of 2009 ✓ the Food Safety Enhancement Act of 2009
	Peningkatan prosentase bea impor setelah krisis			Peningkatan lebih dari 100% dan tidak ada tanda-tanda penurunan prosentase setelah tahun pertama

				✓ ban: bea impor 4% dan pajak tambahan 35% ✓ panel surya: 4% menjadi 31% ✓ pipa baja: 13% menjadi 36,53% hingga 99,14%
--	--	--	--	---

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dengan tabel indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Amerika Serikat memiliki level proteksionis yang berbeda pada sektor finansial dan sektor perdagangan. Kebijakan pemerintah Amerika Serikat pada sektor finansial pasca Krisis Finansial 2008 lebih banyak berada pada kolom level proteksionis general sehingga penulis menyimpulkan bahwa pada kebijakan sektor finansial pasca Krisis Finansial tahun 2008 tergolong sebagai kebijakan yang bersifat proteksionis. Sedangkan pada sektor perdagangan, kebijakan pemerintah Amerika Serikat pasca Krisis Finansial 2008 lebih banyak berada pada kolom level proteksionis total sehingga penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pada sektor perdagangan pasca Krisis Finansial tahun 2008 tergolong sebagai kebijakan yang bersifat proteksionis total.